

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat krisis tahun 1997–1998, perusahaan–perusahaan Indonesia mendapatkan nilai CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) paling rendah di tingkat Asia (McKinsey Company, 1999). Nilai CGPI atau persepsi investor merupakan penilaian mengenai praktik *corporate governance*. Salah satu penyebab rendahnya nilai tersebut adalah tata kelola perusahaan yang tidak efektif dan tingkat transparansi yang rendah (PERC, 1999). Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan dan transparansi merupakan satu prinsip dalam GCG (*Good Corporate Governance* oleh OECD, 2004) menjadi tolok ukur tingkat kepercayaan publik kepada perusahaan karena pengungkapan dan transparansi memberikan berbagai informasi aktivitas perusahaan. Oleh sebab itu, setelah adanya krisis keuangan, investor menjadi lebih memperhatikan pengungkapan informasi perusahaan yang bersifat sukarela (Ho dan Wong, 2001) karena *mandatory disclosure* dirasa belum memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan investor dari laporan tahunan perusahaan (Hrasky dan Collet, 2005).

Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong perusahaan di Indonesia untuk mempraktikkan tata kelola perusahaan dengan mengeluarkan berbagai

peraturan perundang-undangan. Tahun 1999, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) melalui KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Di samping itu, Bapepam sebagai regulator BEI mengeluarkan Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyelenggarakan GCG. Keputusan Bapepam tersebut mewajibkan perusahaan untuk memiliki komisaris independen, komite audit dan sekretaris perusahaan dalam praktik tata kelola perusahaan.

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhan serta meningkatkan kepercayaan investor. Tata kelola perusahaan melibatkan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemangku kepentingan lainnya (Cadbury Committee, 1992 dalam FCGI).

Adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan, pemilik memiliki akses yang terbatas untuk mendapatkan informasi perusahaan secara lengkap. Manajer sebagai agen melakukan perilaku oportunistik dengan menahan berbagai informasi (Ho dan Wong, 2001). Melalui asimetri informasi, konflik keagenan (*agency conflict*) terjadi. Konflik keagenan dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan prinsipal yaitu dengan dipraktikannya tata kelola perusahaan (Midiastuty,

2003). Melalui pengendalian internal yang baik, pelaksanaan tata kelola perusahaan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela sebagai salah satu cara untuk meminimalkan asimetri informasi (Healy dan Palepu, 2001). Dua hal yang ditekankan dalam konsep *good corporate governance*, yaitu: (1) pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat pada waktunya, dan (2) kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Sulistyanto dan Wibisono, 2003).

Berdasarkan berbagai penelitian di luar negeri, praktik tata kelola perusahaan mampu mendorong manajemen untuk meningkatkan pengungkapan sukarela (Meca dan Ballesta, 2010; Akhtaruddin, *et al.*, 2009; Baek, *et al.*, 2009; Donnelly dan Mucahy, 2008; Barako, *et al.*, 2006; Lakhali, 2003; Ho dan Wong, 2001; Raffounier, 1995). Setelah adanya aturan pemerintah Indonesia yang mewajibkan penerapan sistem tata kelola perusahaan, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh sistem tata kelola di Indonesia terhadap praktik pengungkapan sukarela khususnya perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI selama tahun 2008–2011. Dalam penelitian ini, praktik tata kelola perusahaan menggunakan variabel komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuktikan pengaruh penerapan sistem tata kelola perusahaan terhadap praktik pengungkapan sukarela.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu penyebab krisis keuangan di Indonesia adalah rendahnya praktik tata kelola perusahaan sehingga menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Bapepam mewajibkan perusahaan publik untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) melalui Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Tata kelola perusahaan melakukan mekanisme pengawasan secara intensif akan dapat mengurangi *agency conflict*. Salah satu penyebab *agency conflict* adalah asimetri informasi. Tata kelola perusahaan diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan yang dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip GCG yaitu pengungkapan dan transparansi yang menekankan pada penyediaan dan pengungkapan informasi yang material dan relevan. Oleh karena itu, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah apakah tata kelola perusahaan mempengaruhi luas pengungkapan sukarela?

1.3 Batasan Masalah

Batasan Masalah pada penelitian ini adalah

- 1.3.1 Perusahaan publik manufaktur yang mempublikasikan *annual report* pada tahun 2008–2011,
- 1.3.2 Variabel tata kelola perusahaan dalam penelitian ini ada tiga yaitu Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional,

1.3.3 Variabel pengungkapan sukarela diperoleh dari *Voluntary Checklist* Akhtaruddin., *et al* (2009) yang disesuaikan dengan PSAK 1, SE-02/PM/2002, KEP-134/BL/2006, dan UU No.40 tahun 2007.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada:

1.5.1 Praktisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi perusahaan, investor maupun pengguna laporan tahunan lainnya mengenai praktik tata kelola perusahaan dan informasi yang terkait pengungkapan sukarela.

1.5.2 Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pikiran, bacaan, dan bahkan bisa menjadi bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan bagi institusi pendidikan, mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1.6.1 Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Sampel diperoleh dengan metode *purposive sampling* dengan *judgement*: perusahaan manufaktur yang listing di BEI dan mempublikasikan laporan tahunan selama tahun 2008 sampai 2011

1.6.2 Data dan Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data arsip/data sekunder yang berupa data komisararis independen, komite audit, kepemilikan institusional dan pengungkapan sukarela di dalam laporan tahunan yang dapat diakses melalui *website* perusahaan dan *website* BEI (<http://www.idx.co.id>)

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori mengenai tata kelola perusahaan, pengungkapan sukarela, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai analisis deskriptif, hasil pengujian asumsi klasik, dan hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan analisa data, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.